

ANALISIS KONTRIBUSI BAGINDO AZIZ CHAN YOUTH CENTER TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

Thahira Syamsiah¹, Natasya Rahmayuli Irwin², Neng Kamarni³,
Yulia Anas⁴, Zulkifli N⁵
Universitas Andalas^{1,2,3,4,5}
thahirasyamsiah@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2024, khususnya dari sisi retribusi jasa usaha. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder dari Bagindo Aziz Chan Youth Center, BPS Kota Padang, serta hasil wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BACYC memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Padang dengan rata-rata sekitar 0,47% dari total pendapatan sektor retribusi jasa usaha. Meskipun kontribusi nominalnya masih tergolong kecil, temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan *youth center* secara profesional dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Simpulan penelitian ini bahwa BACYC merupakan aset publik non-konvensional yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi sosial, sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan yang adaptif, profesional, dan terintegrasi agar kontribusinya terhadap PAD dapat terus meningkat secara progresif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Jasa Usaha, *Youth Center*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of the Bagindo Aziz Chan Youth center (BACYC) to the local revenue (PAD) of Padang City in 2024, focusing specifically on service sector fees. Using a descriptive quantitative method, the research analyzes secondary data from BACYC, the Padang City Statistics Agency (BPS), and in-depth interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that BACYC contributes approximately 0.47% to the total revenue generated from service sector fees in Padang City. While this nominal contribution may appear small, it highlights the potential for professionally managed youth centers to serve as sustainable alternative income sources for local governments. The study concludes that BACYC represents a non-conventional public asset combining economic value with social functions, underscoring the need for adaptive, professional, and integrated management policies to enhance its progressive contribution to PAD.

Keywords: Local Revenue, Service Sector Fees, *Youth Center*.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan desentralisasi fiskal, setiap negara dituntut untuk memperkuat kapasitas fiskal di tingkat lokal sebagai wujud kemandirian pembangunan. Hal ini sejalan dengan paradigma otonomi daerah, di mana pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menggali potensi ekonomi lokal secara mandiri. Salah satu strategi penting yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar PAD di banyak daerah masih bergantung pada pajak daerah, sementara retribusi daerah justru sering dipandang sebagai sumber sekunder dengan kontribusi relatif kecil. Padahal, menurut Martinez-Vazquez dan McNab (2021), penguatan PAD melalui optimalisasi seluruh sumber penerimaan, termasuk retribusi, menjadi krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan otonomi fiskal daerah. Di Indonesia, arah kebijakan ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang menegaskan pentingnya pemanfaatan aset publik sebagai salah satu instrumen sah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan adanya regulasi ini, penyewaan aset publik seperti gedung, fasilitas olahraga, terminal, dan pusat kebudayaan dapat dijadikan basis pemungutan retribusi jasa usaha secara legal, transparan, dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian empiris terdahulu telah menunjukkan bahwa aset publik, khususnya gedung-

gedung milik pemerintah daerah, memang memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD, meskipun nominalnya masih tergolong kecil. Fakta ini memperlihatkan adanya potensi fiskal yang bisa dimaksimalkan, sekaligus menunjukkan keterbatasan dalam pengelolaannya.

Penelitian oleh Sudarmana dan Sudiarta (2020) di Kabupaten Badung menegaskan bahwa retribusi sewa gedung memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD daerah. Namun, meskipun kontribusinya signifikan secara statistik, porsi retribusi sewa gedung terhadap keseluruhan PAD masih relatif kecil. Temuan ini memperlihatkan bahwa aset publik memiliki peran penting, tetapi kontribusi fiskalnya sering kali kurang sebanding dengan potensi nilai aset yang dimiliki. Artinya, terdapat kesenjangan antara nilai ekonomi aset dan kontribusi riil yang masuk ke kas daerah, yang disebabkan oleh belum optimalnya strategi pemanfaatan aset tersebut.

Kajian selanjutnya oleh Sari et al. (2022) di Kota Mataram memperluas temuan tersebut dengan menyoroti retribusi dari penyewaan fasilitas yang dikelola Dinas PUPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun retribusi mampu menambah PAD, realisasinya jauh dari optimal. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang membuat aset publik kalah bersaing dengan penyedia jasa swasta yang menawarkan layanan lebih modern dan fleksibel. Studi ini memberikan bukti bahwa persoalan efektivitas bukan hanya terletak pada mekanisme pemungutan, tetapi juga pada daya tarik aset publik itu sendiri dalam pasar jasa. Dengan kata lain,

keberhasilan retribusi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas fasilitas yang ditawarkan.

Dalam perkembangannya, Eljawati dan Nurafdaliana (2024) memberikan perspektif berbeda dengan menekankan pentingnya strategi pengelolaan gedung publik yang tidak hanya terbatas pada penyewaan langsung, tetapi juga melalui skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta maupun komunitas. Penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan kolaboratif dan diversifikasi skema pengelolaan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara lebih berkelanjutan. Hal ini memberikan perspektif baru bahwa pengelolaan aset publik tidak seharusnya statis, melainkan dinamis dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat serta tren pasar. Oleh karena itu, pengelolaan berbasis inovasi kelembagaan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kontribusi aset publik terhadap PAD.

Penelitian lainnya oleh Anggul et al. (2024) dengan fokus pada Gedung GOR Flobamora, salah satu aset terbesar milik Pemerintah Provinsi NTT. Dengan nilai aset yang sangat besar yakni Rp207,7 miliar, kontribusi yang diberikan GOR Flobamora terhadap PAD justru lebih rendah, hanya sekitar 0,10–0,12% saja. Kondisi ini semakin memperlihatkan adanya fenomena *underutilization* atau pemanfaatan aset yang belum optimal, di mana potensi ekonomi gedung olahraga berskala besar tersebut tidak mampu diubah menjadi sumber penerimaan fiskal yang sebanding. Rendahnya kontribusi juga disebabkan oleh terbatasnya variasi kegiatan yang mampu diselenggarakan, rendahnya strategi promosi, serta minimnya

inovasi dalam model kerja sama pemanfaatan aset.

Temuan berbeda kemudian diungkapkan oleh Afariwinta et al. (2025) dalam studi mereka di Kota Padang yang menganalisis efektivitas realisasi retribusi daerah periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi masih berfluktuasi dan sebagian besar tahun nilainya berada di bawah 100%, meskipun pada 2023 sempat mencapai 107,87%. Selain itu, kontribusi retribusi terhadap PAD relatif kecil, hanya berkisar antara 6–9% per tahun. Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, minimnya sosialisasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Studi ini memberikan bukti kuat bahwa problematika retribusi daerah tidak hanya terkait dengan regulasi, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat.

Terakhir, hasil penelitian terbaru oleh Panie et al. (2025) di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin mempertegas keterbatasan aset publik konvensional dalam memberikan kontribusi fiskal yang berarti. Kajian pada UPTD Taman Budaya Gerson Poyk menunjukkan bahwa meskipun nilai aset yang dimiliki sangat besar, mencapai Rp48,9 miliar, kontribusinya terhadap PAD Provinsi NTT hanya berkisar pada 0,10–0,34% per tahun. Disparitas antara besarnya nilai aset dengan kecilnya kontribusi riil terhadap PAD menegaskan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan output

fiskal yang dihasilkan. Hal ini menggambarkan bahwa sekadar memiliki aset publik bernilai tinggi tidak menjamin peningkatan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah jika pengelolaannya masih bersifat konvensional dan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pasar.

Jika dicermati secara berkesinambungan, rangkaian penelitian di atas menunjukkan bahwa kontribusi aset publik terhadap PAD memang nyata, tetapi masih jauh dari optimal. Pola yang berulang adalah rendahnya efektivitas pemungutan, terbatasnya kualitas sarana, tingginya persaingan dengan penyedia jasa swasta, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan. Baik aset berskala kecil seperti gedung serbaguna maupun aset bernilai besar seperti GOR dan pusat kebudayaan, pada akhirnya hanya mampu memberikan tambahan penerimaan dalam porsi yang relatif kecil. Hal ini menegaskan bahwa model pengelolaan konvensional yang berfokus pada penyewaan fasilitas belum cukup untuk memberikan dampak fiskal yang signifikan.

Dengan demikian, diperlukan perluasan perspektif penelitian menuju aset publik non-konvensional yang memiliki fungsi ganda, yakni sosial sekaligus ekonomi. *Youth center* seperti Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) di Kota Padang hadir sebagai bentuk inovasi kelembagaan yang tidak hanya menyediakan ruang aktivitas sosial dan kepemudaan, tetapi juga dikelola dengan skema retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi langsung kepada PAD. Posisi ini membedakan BACYC dari aset publik konvensional, karena ia mengintegrasikan peran

pemberdayaan ekonomi kreatif dengan strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu memberikan bukti empiris bahwa *youth center* dapat menjadi instrumen diversifikasi sumber PAD sekaligus model pengelolaan aset publik yang berorientasi ganda: sosial dan fiskal.

Sejalan dengan keterbatasan aset konvensional, muncul kebutuhan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan aset publik non-konvensional yang dapat memberikan nilai tambah ganda: fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi. Salah satu contohnya adalah *youth center*, yaitu fasilitas publik yang dibangun untuk mendukung aktivitas kepemudaan, pengembangan kreativitas, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. *Youth center* tidak hanya berperan sebagai ruang interaksi sosial, tetapi juga dapat menjadi instrumen ekonomi bila fasilitasnya disewakan untuk kegiatan produktif. Namun, tinjauan literatur memperlihatkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran sosial *youth center*, bukan kontribusi fiskalnya. Misalnya, Putri dan Haryanto (2019) menyoroti peran *youth center* dalam memperkuat kapasitas pemuda, tetapi belum mengaitkannya dengan peningkatan PAD melalui mekanisme retribusi daerah. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian, khususnya dalam melihat *youth center* sebagai aset fiskal yang memiliki kontribusi nyata bagi keuangan daerah.

Dalam konteks Indonesia, salah satu *youth center* yang menarik untuk diteliti adalah Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) di Kota Padang. Diresmikan pada akhir 2022 dan mulai aktif beroperasi pada 2023, BACYC dirancang sebagai pusat

keaktivitas pemuda yang menaungi 17 sub sektor ekonomi kreatif sesuai klasifikasi Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF). Fasilitas yang tersedia meliputi ruang rapat, auditorium, ruang pameran, studio multimedia, *coworking space*, hingga ruang diskusi terbuka. Selama tahun pertama operasional, BACYC belum dapat memberikan kontribusi resmi terhadap PAD karena belum adanya dasar hukum yang jelas mengenai pungutan retribusi. Baru pada tahun 2024, setelah disahkannya Peraturan Daerah Kota Padang tentang retribusi jasa usaha, BACYC mulai melakukan pemungutan biaya sewa atas fasilitas yang digunakan masyarakat, komunitas, UMKM, maupun instansi lain. Laporan keuangan menunjukkan bahwa BACYC berhasil menyumbang sekitar Rp200 juta atau setara 0,47% dari total retribusi daerah Kota Padang. Angka ini relatif lebih besar dibandingkan kontribusi fasilitas publik lain seperti GOR Flobamora maupun Taman Budaya Gerson Poyk, sehingga memperlihatkan potensi strategis *youth center* sebagai sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap penelitian yaitu belum ada studi empiris yang menilai *youth center* bukan hanya dari sisi sosial, tetapi juga kontribusinya terhadap PAD. Sedangkan, *youth center* memiliki karakter unik sebagai aset publik non-konvensional yang menyatukan fungsi kepemudaan dengan potensi ekonomi kreatif. Dengan demikian, keterbaruan penelitian ini terletak pada upaya mengevaluasi *youth center*, khususnya BACYC, sebagai model diversifikasi objek retribusi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur tentang

optimalisasi aset daerah sekaligus memberi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengelola *youth center* secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang melalui pos retribusi jasa usaha pada tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kontribusi Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari pos retribusi jasa usaha. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan pendapatan BACYC tahun 2024 dan data retribusi daerah Kota Padang dari BPS. Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga wawancara mendalam dengan pihak pengelola BACYC dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang. Analisis dilakukan dengan menghitung persentase kontribusi relatif, menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Nilai Bagian}}{\text{Nilai Total}} \times 100\%$$

Dalam konteks penelitian ini, rumus tersebut diterapkan untuk menghitung kontribusi BACYC terhadap PAD Kota Padang pada tahun 2024, sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi BACYC (\%)} = \frac{\text{Pendapatan BACYC 2024}}{\text{Retribusi Daerah Kota Padang 2024}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Secara akumulatif, pendapatan BACYC dari Januari hingga Desember 2024 tercatat sebesar Rp227.798.650,00. Jika

dibandingkan dengan total penerimaan retribusi daerah Kota Padang tahun 2024 yang mencapai Rp48.690.194.076,69, maka kontribusi BACYC terhadap PAD dari pos retribusi jasa usaha dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi BACYC} = \frac{227.798.650}{48.690.194.076,69} \times 100\% = 0,47\%$$

Dengan demikian, kontribusi BACYC terhadap PAD Kota Padang sebesar 0,47% tergolong masih kecil secara nominal, namun memiliki arti strategis karena menunjukkan potensi besar dari sektor pelayanan publik berbasis ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, *youth center* tidak hanya berperan sebagai fasilitas sosial, namun juga sebagai sumber pendapatan daerah yang layak untuk terus dikembangkan, baik melalui peningkatan promosi, perluasan kegiatan, maupun optimalisasi penyewaan fasilitas.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelaskan bagaimana kontribusi Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang melalui pos retribusi jasa usaha. Berdasarkan laporan yang diperoleh, BACYC mulai beroperasi secara aktif pada tahun 2023 setelah diresmikan pada akhir 2022. Namun, sepanjang tahun pertama operasionalnya, belum terdapat dasar hukum yang memperbolehkan pengenaan biaya sewa atas penggunaan fasilitas, sehingga tidak tercatat adanya kontribusi pendapatan resmi dari BACYC ke kas daerah. Pada tahun 2024, setelah disahkannya Peraturan Daerah Kota Padang mengenai

retribusi jasa usaha, BACYC mulai menerapkan pemungutan biaya sewa atas pemanfaatan ruang dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat umum. Pemberlakuan perda tersebut menjadi tonggak awal bagi BACYC dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Padang.

Sebagai salah satu aset publik non-konvensional, Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) telah ditetapkan sebagai objek retribusi jasa usaha melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif penyewaan berbagai fasilitas yang tersedia di BACYC. Fasilitas yang disediakan mencakup ruang serbaguna, studio, hingga area pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha kreatif. Rincian tarif retribusi yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha

Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center	
	Tarif (Rp.)
Exhibition Hall	10.000,00/m ² /hari
Studio Music	50.000,00/jam
Mini Theater	3.000.000,00/hari
Podcast Studio	100.000,00/jam
Ruang Kuliner	1.000.000,00/bulan
Photo Produk Studio	100.000,00/jam
Halaman Samping dan Depan	5.000,00/6 jam

Sumber: Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2024

Lebih lanjut, dari laporan Bagindo Aziz Chan Youth Center diperoleh informasi bahwa BACYC dirancang sebagai pusat pengembangan kreativitas pemuda yang menampung 17 subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan

klasifikasi dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF). Beberapa sub sektor tersebut diantaranya adalah kuliner, kriya, musik, film dan animasi, fotografi, desain komunikasi visual, aplikasi dan *game*, seni pertunjukan, penerbitan, fesyen, dan lain sebagainya. Fasilitas yang tersedia di dalam BACYC sangat beragam, meliputi ruang rapat kecil dan besar, ruang auditorium, ruang podcast, *co-working space*, ruang pameran, studio multimedia, hingga ruang terbuka untuk diskusi atau pertunjukan seni. Fasilitas ini tidak hanya disediakan untuk mendukung kegiatan komunitas kreatif dan organisasi pemuda, namun juga dapat disewa oleh pelaku usaha kecil, lembaga pendidikan, dan instansi lain untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial mereka.

Respon masyarakat terhadap keberadaan BACYC dapat dilihat dari tingginya jumlah kunjungan sepanjang tahun 2024. Data mencatat bahwa jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 5.114 orang, diikuti oleh Januari dengan 5.073 orang. Sementara itu, jumlah pengunjung terendah tercatat pada bulan Agustus sebanyak 2.719 orang, yang kemungkinan disebabkan oleh momen libur sekolah serta minimnya kegiatan yang dijadwalkan. Secara umum, kunjungan masyarakat ke *youth center* bersifat fluktuatif, sejalan dengan naik turunnya intensitas kegiatan dan penyewaan ruang. Jenis fasilitas yang paling banyak digunakan adalah ruang rapat kecil dan auditorium. Ruang rapat umumnya dipakai untuk *workshop* dan rapat komunitas, sedangkan auditorium digunakan untuk seminar, pertunjukan seni, hingga peluncuran

produk UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa BACYC telah menjadi ruang multifungsi yang menjembatani kreativitas pemuda dengan aktivitas ekonomi lokal.



Gambar 1. Jumlah Pengunjung Bagindo Aziz Chan Youth Center 2024

Sumber: Laporan Bagindo Aziz Chan Youth center Kota Padang (2024)

Pendapatan Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang tahun 2024. Setelah tidak mencatatkan pendapatan pada Januari, retribusi mulai diberlakukan pada Februari dengan penerimaan sebesar Rp8.000.000. Lonjakan signifikan terjadi pada Maret (Rp21.525.000) dan mencapai puncaknya pada Mei (Rp42.561.650), yang bertepatan dengan tingginya intensitas kegiatan komunitas dan pelatihan. Namun, pendapatan menurun drastis di Juli (Rp4.200.000), kemungkinan karena libur sekolah dan penurunan aktivitas instansi. Setelahnya, terdapat peningkatan kembali, terutama pada Oktober (Rp23.750.000) dan November (Rp42.200.000), sebelum turun tajam di Desember menjadi Rp1.000.000 akibat libur akhir tahun.

Tabel 2. Jumlah Pendapatan Bagindo Aziz Chan Youth Center 2024

Bulan	Pendapatan BACYC
Januari	Rp0
Februari	Rp8.000.000
Maret	Rp21.525.000
April	Rp7.500.000
Mei	Rp42.561.650
Juni	Rp29.650.000
Juli	Rp4.200.000
Agustus	Rp15.662.000
September	Rp9.000.000
Oktober	Rp23.750.000
November	Rp42.200.000
Desember	Rp1.000.000
Total	Rp227.798.650

Sumber: Laporan Bagindo Aziz Chan Youth center Kota Padang (2024)

Jika dilihat dari keseluruhan tren, terdapat indikasi bahwa pendapatan BACYC meningkat seiring dengan naiknya pemanfaatan fasilitas dan intensitas kegiatan yang berlangsung. Pendapatan tertinggi tercatat pada bulan-bulan ketika banyak kegiatan komunitas, pelatihan, atau acara instansi berlangsung, seperti pada Mei dan November. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan *youth center* oleh masyarakat maupun lembaga masih sangat dipengaruhi oleh momentum tertentu, seperti musim pelatihan, penutupan program tahunan, atau peringatan hari-hari besar. Dengan kata lain, optimalisasi pemanfaatan belum berjalan secara merata sepanjang tahun.

Ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pendapatan BACYC tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas semata, melainkan juga pada strategi promosi yang tepat, pengelolaan kalender

kegiatan yang aktif dan terkoordinasi, serta kemitraan yang kuat dengan pelaku ekonomi kreatif dan institusi pemerintah atau swasta. Oleh karena itu, untuk mendorong pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, perlu upaya sinergis dalam memperluas jangkauan promosi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengembangkan program tematik yang menarik secara rutin.

Kontribusi BACYC terhadap PAD Kota Padang tahun 2024 sebesar 0,47% memiliki nilai strategis yang tidak hanya dilihat dari besaran nominalnya, tetapi juga sebagai model awal dalam pemanfaatan aset publik yang berbasis ekonomi kreatif. Kesenambungan dengan penelitian terdahulu terlihat jelas, terutama seperti yang dikemukakan oleh Sudarmana dan Sudiarta (2020) serta Eljawati dan Nurafdaliana (2024), yang menegaskan bahwa pemanfaatan gedung dan aset milik pemerintah daerah melalui skema sewa atau retribusi dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Selain itu, dinamika pendapatan BACYC yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh momentum kegiatan komunitas menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset publik sangat ditentukan oleh strategi promosi, pengelolaan jadwal kegiatan, dan kolaborasi lintas sektor.

Temuan Anggul et al. (2024) menegaskan bahwa rendahnya kontribusi retribusi jasa usaha sering kali dipengaruhi oleh terbatasnya variasi kegiatan, rendahnya strategi promosi, serta minimnya inovasi dalam pemanfaatan aset publik. Oleh karena itu, BACYC dapat menjadi contoh awal dari diversifikasi objek retribusi daerah yang berbasis ekonomi kreatif dan komunitas, yang

mendukung arah kebijakan fiskal daerah sebagaimana ditegaskan dalam UU HKPD serta studi-studi terdahulu yang mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset lokal

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) Kota Padang merupakan salah satu aset publik non-konvensional yang berhasil memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos retribusi jasa usaha pada tahun 2024. Setelah diberlakukannya peraturan daerah mengenai retribusi, BACYC mulai melakukan pemungutan biaya sewa atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia, seperti ruang rapat, auditorium, studio, dan *coworking space*. Sepanjang tahun 2024, BACYC mencatatkan kontribusi sebesar Rp200 juta ke dalam PAD Kota Padang.

Kontribusi Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) menunjukkan bahwa fasilitas publik untuk pemberdayaan pemuda juga memiliki nilai ekonomi ketika dikelola secara strategis dan legal. Meski kontribusinya terhadap total retribusi daerah masih kecil, BACYC membuka peluang diversifikasi PAD dari sektor ekonomi kreatif dan aset komunitas. Temuan ini menguatkan bahwa pengelolaan aset daerah berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat juga menandakan relevansi sosial dan potensi ekonomi *youth center* sebagai instrumen pembangunan.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa youth center dapat

menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan aset publik non-konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan yang lebih adaptif, termasuk pembentukan unit pengelola yang profesional, penyusunan kalender kegiatan tematik yang menarik, serta optimalisasi promosi dan kemitraan lintas sektor. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menyusun *roadmap* pengembangan youth center sebagai bagian dari strategi penguatan fiskal lokal, sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat ditingkatkan secara progresif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriwinta, G., Anggraini, D., & Mulyani, F. (2025). Analisis Efektivitas Realisasi Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 4(1), 127-134.
<https://doi.org/10.47233/jppisb.v4i1.1898>
- Anggul, Y. A., Ngongo, Y. L., & Fanggidae, V. (2024). Analisis tarif sewa gedung GOR Flobamora terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 229–241.
<https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.164>
- Eljawati, E., & Nurafdaliana, N. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Aset dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 14(1).
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEK/P/article/view/2784>

- Hardinata, R., Sikumbang, N., & Sumitra, Y. (2023). Perancangan Gedung Serbaguna Dengan Konsep MICE di Kota Bukittinggi. *E-Jurnal Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan*, Universitas Bung Hatta. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFTSP/article/view/20935>
- Hasyim, S., Rustiana, E., & Permana, H. (2021). Peranan Bumdes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(01), 40–51. <http://www.journal.uniga.ac.id/>
- Kuncoro, M. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Aset Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 30(2), 145–162. <https://doi.org/10.1234/jep.2022.30.2.145>
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2021). Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. Georgia State University. https://scholarworks.gsu.edu/econ_facpub/34
- Nugroho, D., & Dewi, T. (2020). Pengelolaan Gedung Serbaguna sebagai Sumber PAD di Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.
- Oteiza, I., Bianchi, C., & González, M. (2020). Adaptive Reuse Of Public Assets: Strategies For Sustainable Urban Development. *Journal of Urban Management*, 9(3), 356–370. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.07.003>
- Pagiu, C. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Economix*, 12(1), 45–59. <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/download/18941/10058>
- Panie, A. D., Ndolu, R., & Lede, A. (2025). Analisis Tarif Sewa Gedung UPTD Taman Budaya Gerson Poyk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1053-1066. <https://share.google/EPBQrTgI82HnJvgZ3>
- Putri, A. N., & Haryanto, T. (2019). Peran Youth Center Dalam Pemberdayaan Pemuda di Kota Surakarta. *Jurnal Pemuda*, 5(3), 34–47. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/5833/1/Dinamik%20Islam%20dan%20Masyarakat%20Muslim%20di%20Surakarta.pdf>
- Redaksi, R. (2024). Pendapatan Bagindo Aziz Chan Youth Center (BACYC) berkontribusi pada PAD Kota Padang. Diakses dari Padangkita.com. <https://www.padangkita.com>
- Sari, S., Pusparini, N. W., & Mariadi, I. M. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1). <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jeb/article/view/36>

- Sudarmana, I. M., & Sudiarta, I. K. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 9(7), 2762–2786. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/56466>
- Surgawati, I. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 75–85. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/3566>
- Vecchi, V., Hellowell, M., & Gatti, S. (2021). Public–Private Partnerships and The Value of Public Assets: Insights From Healthcare. *Public Management Review*, 23(9), 1336–1356. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1718188>